

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan total jumlah penduduk 252.200.000 jiwa menurut sumber (BPS). Dengan total penduduk sebanyak ini, Indonesia masih termasuk dalam golongan negara sedang berkembang. Hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Lanjouw dalam Ginting, *et al* (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan berkurangnya kemiskinan.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan (Ginting 2008). Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor yang penting. Dengan adanya modal manusia yang berkualitas, maka kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik, sesuai dengan yang dikatakan Mubyarto dalam Mailendra (2009) “*social development is economics development*”.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup (BPS). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

IPM dengan presentase yang baik menunjukkan bahwa dalam daerah tersebut tingkat kesejahteraan masyarakatnya cukup baik. Menurut Oates (1993) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub-nasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun dengan tren yang positif diharapkan dapat mendorong kesejahteraan dalam masyarakat yang dinilai berdasarkan IPM.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Dan IPM Di DIY Periode 1999-2013
(Persen)

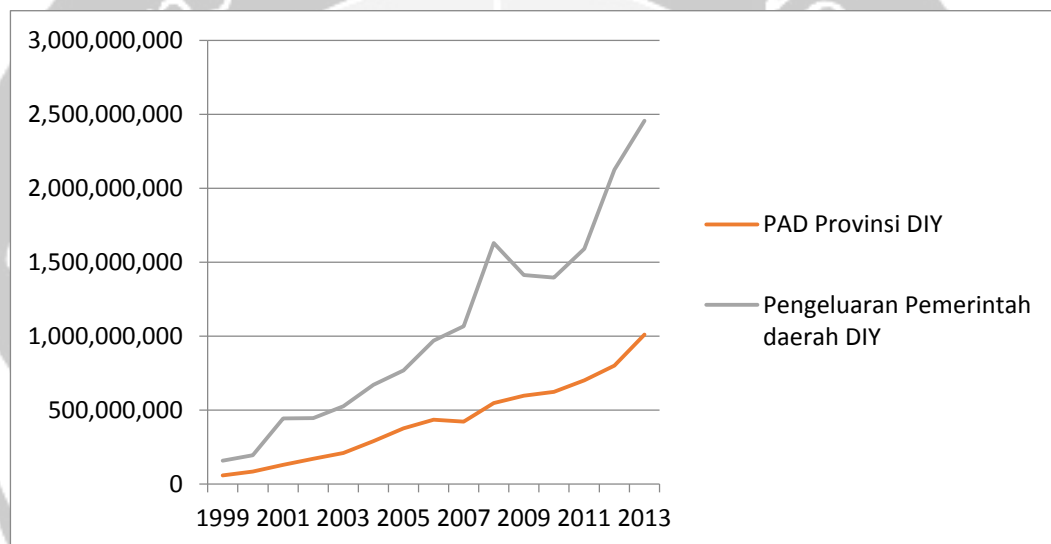
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	IPM
1999	0,78	68,7
2000	2,44	69,4
2001	4,26	70,1
2002	4,5	70,8
2003	4,58	71,8
2004	5,12	72,9
2005	4,73	73,5
2006	3,7	73,7
2007	4,31	74,15
2008	5,03	74,88
2009	4,43	75,23
2010	4,88	75,77
2011	5,17	76,32
2012	5,32	76,75
2013	5,4	77,37

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY (Data Diolah Dari PDRB), Tahun 1999-2013.

Pengeluaran sektor publik seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan pada suatu daerah (Astri, 2013). Pengeluaran publik suatu daerah pada era desentralisasi fiskal bergantung kepada penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan dari penerimaan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, penerimaan keuangan daerah bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut seperti pajak retribusi daerah, pajak daerah dan lain-lain. Penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dana perimbangan dan pendapatan lain-lain.

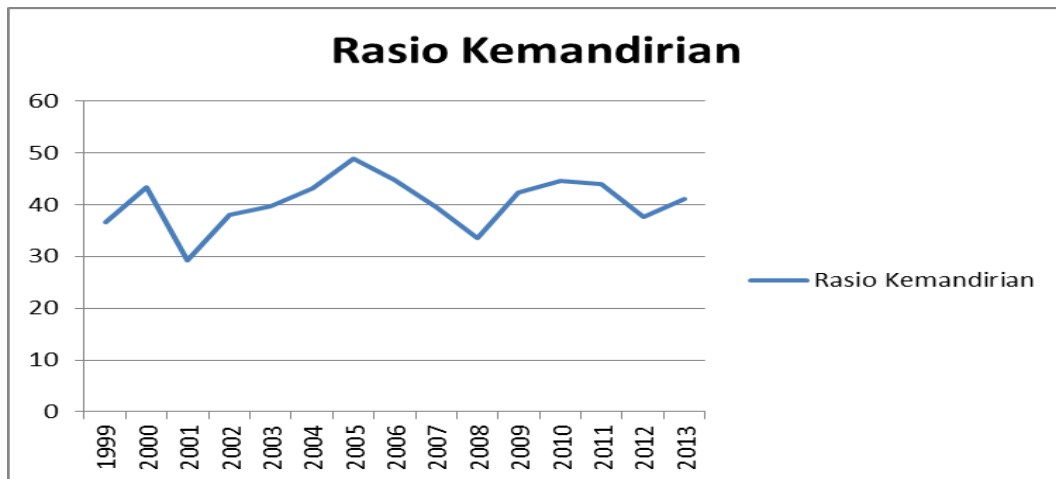
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No.33/2004). PAD dinilai sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemandirian suatu daerah kepada pemerintah pusat dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian keuangan disini dilihat dari rasio antara pendapatan asli daerah dengan pengeluaran pemerintah daerah.



Gambar 1.1
Data Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah DIY Tahun 1999-2013 Dalam Ribu Rupiah

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka Tahun 1999-2013 (Data Diolah).

Dengan rasio ini dapat diketahui apakah suatu daerah itu mandiri atau tidak. Ini dilihat dari persentase rasio yang terjadi, jika rasio antara PAD dengan pengeluaran pemerintah semakin besar persentasenya, maka daerah itu bisa dikatakan mandiri dalam hal keuangan daerah.

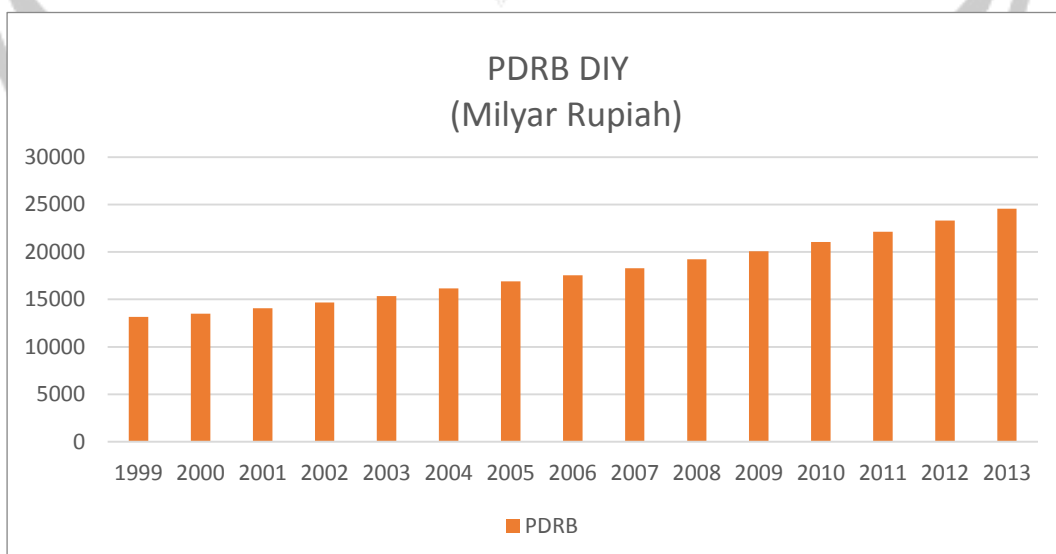


Gambar 1.2

Rasio Antara Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah DIY Tahun 1999-2013 Dalam Persen

Sumber : BPS, DIY Dalam Angka Tahun 1999-2013(Data Diolah).

Selain PAD, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama ini juga digunakan sebagai ukuran penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi era otonomi daerah.



Gambar 1.3

Produk Domestik Regional Bruto DIY Tahun 1999-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Sumber: databank.worldbank.org Tahun 1999-2013 (Data Diolah).

Tabel 1.2
Perbandingan antara PDRB dan IPM DIY dengan Provinsi lainnya di Pulau Jawa Tahun 2011-2013

Provinsi	Tahun	PDRB (Milyar Rupiah) (Nominal)	IPM (Persen)
DIY	2011	22131,77	76,32
	2012	23308,56	76,75
	2013	24567,48	77,37
Jawa Tengah	2011	198270,12	72,94
	2012	210848,42	73,36
	2013	223099,74	74,05
Jawa Barat	2011	343193,56	72,73
	2012	364752,40	73,11
	2013	386838,84	73,58
DKI Jakarta	2011	422242,25	77,97
	2012	449805,42	78,33
	2013	477285,25	78,59
Jawa Timur	2011	366983,28	72,18
	2012	393662,85	72,83
	2013	419428,45	73,54

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY Tahun 2011-2013.

Wilayah dengan PDRB tinggi, belum tentu memiliki IPM yang tinggi pula, sebaliknya wilayah dengan tingkat IPM rendah belum tentu tingkat PDRB daerah tersebut juga rendah. Inilah yang terjadi di DIY, dengan PAD dan PDRB yang relatif rendah tetapi Indeks Pembangunan Manusia yang ada relatif tinggi dibanding dengan Provinsi lain.

Studi kasus ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY merupakan daerah yang unik yang ada di Indonesia. Dengan total Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto yang relatif rendah dibanding dengan daerah yang lain, tetapi memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang relatif tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Ini menandakan bahwa

kesejahteraan di DIY tinggi meskipun total pendapatan pemerintah daerah relatif rendah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY?
- 2) Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY?
- 3) Bagaimanakah pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap manfaat dari penelitian ini bisa dilaksanakan oleh semua kalangan, baik bagi penulis sendiri, bagi penulis selanjutnya dan terutama bagi pemerintah daerah DIY. Supaya dengan penerimaan dari PAD dan PDRB yang ada, pemerintah daerah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di DIY, serta memberikan masukan kepada pemerintah daerah DIY untuk melakukan kebijakan yang lebih tepat kaitannya dengan pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara simultan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY.

1) Bagi penulis selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kemandirian keuangan daerah dan kaitannya dengan IPM.

2) Bagi pemerintah daerah DIY

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah DIY. Supaya dari penerimaan PAD dan PDRB yang ada pemerintah daerah dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di DIY yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara simultan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY.

3) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang kemandirian keuangan daerah, serta dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kemandirian keuangan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
- 2) Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.
- 3) Secara bersama-sama kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di DIY.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, antara lain: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Penjelasan mengenai bagian-bagian di atas akan dijelaskan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan pustaka ini akan dikemukakan tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan alur penulisan dalam penulisan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang terdiri dari metode pengumpulan data, metode analisis serta jenis dan sumber data yang dipakai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV akan dijelaskan tentang objek penelitian, hasil dan pembahasan data dari penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berisikan dengan pembahasan dalam penelitian.